



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 26/SK-BUP/HK/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA: Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari Perangkat Daerah yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, atau berdasarkan evaluasi ternyata tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan perubahan atas Keputusan ini;
- KETIGA: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 26/SK-BUP/HK/2025, TANGGAL 16 JANUARI
2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

NO	JUDUL	PENGUSUL
1	2	3
1.	Tata Cara Pemberian Persetujuan Lokasi untuk Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan dan lahan pada Kawasan Gambut dan/atau Mangrove dan/atau Lahan Lainnya yang berada di Luar Kawasan Hutan pada Wil Kab Kukar	DLHK/SDA
2.	Ketentuan Umum dan tata cara Pemungutan Retribusi Daerah	BAPENDA
3.	Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan	BAPENDA
4.	Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji	BAG KESRA
5.	Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBD	BAG KESRA
6.	Beasiswa Kukar Idaman	BAG KESRA
7.	Mekanisme Penghunian Asrama Pelajar dan Mahasiswa Kukar	BAG KESRA
8.	Pedoman Penyusunan APBDes TA 2026	DPMDes
9.	Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Thn 2026	DPMDes
10.	Pengalokasian Bagian asil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa Thn 2026	DPMDes
11.	Klinik Desa	DPMDes
12.	Pedoman Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Desa	DPMDes
13.	Kewenangan yang ditugaskan dan Kewenangan lain yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemda	DPMDes
14.	Peraturan Pelaksana Perda No 4 Thn 2017 ttg Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan	DISLAUTPERIKANAN/SDA
15.	Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	DLHK
16.	Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemda	DISKOMINFO



17.	Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemda	DISKOMINFO
18.	Perubahan Ketiga Perbup No 51 Thn 2019 ttg Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Staf Desa	DPMDes
19.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Bappeda
20.	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Bappeda
21.	Rencana Kerja OPD 2026	Bappeda
22.	Perubahan Rencana Kerja OPD 2025	Bappeda
23.	Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi	DPMPTSP
24.	Tata Cara Pemberian Penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	DPMPTSP
25.	Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kab Kutai Kartanegara	DPMPTSP
26.	Penjabaran APBD 2026	BPKAD
27.	Perubahan APBD 2025	BPKAD
28.	THR dan Gaji ke-13	BPKAD
29.	Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2024	BPKAD
30.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggungjawab dan Kewenangan serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Organisasi
31.	Perubahan Atas Perbup No 83 Thn 2023 ttg Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perumda Air Minun Tirta Mahakam	PDAM
32.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggungjawab dan Wewenangan serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah	Organisasi
33.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggungjawab dan Wewenangan serta Tata Kerja UPTD Puskesmas pada Dinkes	Organisasi
34.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggungjawab dan Wewenangan serta Tata Kerja Koordinator Wilayah Provinsi	Organisasi
35.	Pembubaran UPTD di Lingk Kab Kukar	Organisasi
36.	Perubahan atas Perbup No 12 Thn 2024 ttg TPP di lingk Pemda	Organisasi
37.	Pakaian Dinas ASN di Lingk Pemkab Kukar	Organisasi
38.	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemdes Kab Kukar	Organisasi
39.	Sistem Kerja di Lingk Pemkab Kukar	Organisasi



40.	Perubahan atas Perbup No 12 Thn 2018 ttg Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Pembiayaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	Bag SDA
41.	Pembebasan BPHTB bagi MBR	Bapenda
42.	Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi MBR	Bapenda

